



PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (*COMMAND RESPONSIBILITY*) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA

Radityo Fikri Morteza*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : radityofikrimorteza@gmail.com

ABSTRAK

Batalyon Aidar sebagai salah satu kelompok bersenjata yang melakukan kejahatan perang di Ukraina yang di bentuk oleh terdakwa Serhiy Melnychuk sebagai mantan komandan batalyon tersebut. Tindakan terdakwa telah menyalahi aturan dari pertanggungjawaban komando sebagai pemegang otoritas kekuasaan pasukannya dengan memerintahkan bawahannya melakukan kejahatan perang. Hubungan antara atasan dan bawahan terjadi karena ada unsur komando, pemegang komando menjalankan fungsinya secara langsung pasukan yang berada dibawahnya, sementara pemegang komando tertinggi bertanggung jawab sebagai pemegang kebijakan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan pertanggungjawaban komando dalam instrumen hukum humaniter internasional dan pertanggungjawaban komando dalam kejahatan perang oleh Batalyon Aidar di Ukraina.

Kata kunci: pertanggungjawaban komando, kejahatan perang, hukum humaniter internasional

ABSTRACT

Battalion Aidar is one as one of the armed groups to commit war crimes in Ukraine, which was established by the defendant Serhiy Melnychuk as the former commander of the battalion. Action the defendant has violated the rules of command responsibility as holders of the power authority by ordering his subordinate forces committed war crimes. The relationship between superiors and subordinates occurs because there is an element of command, holders perform their functions directly command troops who are below, while the holder of the highest command responsible for policy holders. Therefore, more research is needed on setting instrument command responsibility in international humanitarian law and command responsibility in war crimes by Battalion Aidar in Ukraine.

Keywords: *command responsibility, war crimes, international humanitarian law*

I. PENDAHULUAN

Penduduk Ukraina terbagi menjadi dua bagian, Timur dan Barat, hal ini terjadi karena runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Akibat runtuhnya Uni Soviet Ukraina memiliki dua etnis identitas pada satu negara yaitu masyarakat Rusia yang berada di Selatan dan Timur Ukraina dan wilayah Barat. Masyarakat yang tinggal di sekitar barat Ukraina menyebut mereka

Ukrainian dan di sebelah Timur dan Selatan khususnya Crimea menyebut diri mereka Russian.¹ Ukraina merupakan negara di wilayah Eropa Timur yang bertetangga dengan negara-negara Uni-Eropa dan rekan kerjasama di wilayah Timur.

Presiden Ukraina, Viktor

¹ Ukraine Census 2001, <http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/>, di akses 27 April 2016, pukul 11.20 WIB.

Yanukovych menarik diri dari kesepakatan yang telah dirancang dengan Uni-Eropa mengenai perjanjian perdagangan, hal ini memicu perselisihan antara para pemimpin Uni-Eropa dan gelombang protes di Kiev. Putin berjanji miliaran bantuan keuangan kepada Yanukovych sebagai demonstrasi di Maidan, Kiev.² Yanukovych menanggapi dengan memberlakukan serangkaian langkah-langkah anti-protes yang segera dicabut oleh parlemen setelah dua demonstran tewas dalam bentrokan dengan polisi di Januari 2014. Protes menyebar ke Timur Ukraina, kepada kubu-kubu atau pendukung Yanukovych, dan kekerasan di Maidan meningkat secara dramatis. Lebih dari 70 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi dan pasukan keamanan pada bulan Pebruari 2014, sebagai dukungan tersisa untuk Yanukovych dan pemerintahannya yang hancur. Pada akhirnya Yanukovych melarikan diri dari Ukraina.

Dampak dari pembatalan perjanjian oleh Yanukovych menciptakan ketegangan hingga muncul konflik baru yaitu krisis Ukraina. Crimea menjadi tragedi dimana militer Rusia, masyarakat pro-Rusia, dan separatist melawan militer Ukraina maupun pasukan milisi melakukan peperangan. Crimea merupakan bagian resmi dari Ukraina, terletak di semenanjung yang membentang dari selatan Ukraina antara Laut Hitam dan Laut Azov. Rusia ingin melakukan klaim

² Aljazeera, *Ukraine, Russia cut \$15B gas deal*, <http://america.aljazeera.com/articles/2013/12/17/russia-restores-oilflowstoukraine.html>, di akses 27 April 2016, pukul 11.35 WIB.

terhadap wilayah Crimea dengan memunculkan bukti dan laporan dari masyarakat Ukraina pro-Rusia yang berada di selatan maupun timur. Rusia melakukan dengan dengan bukti yaitu memiliki pangkalan militer di Crimea, dan perjanjian yang ada dengan Ukraina mengenai kepemilikan Crimea.³ Crimea berisikan etnis Rusia, yang akhirnya menggerakkan Vladimir Putin melakukan intervensi militer ke wilayah Crimea untuk melindungi masyarakatnya.

Rusia memasuki wilayah perbatasan Timur Ukraina. Sekitar 40.000 tentara Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina, kota-kota Timur Donetsk, Kharkiv dan Luhansk dengan intervensinya.⁴ *Hastag* anti-Maidan merupakan gerakan penolakan yang digunakan oleh masyarakat pro-Rusia kepada pemerintahan Ukraina pada 2014. Masyarakat pro-Rusia yang melakukan demonstrasi sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah Donetsk, akan tetapi di Crimea dan sekitarnya. Melihat dari peristiwa yang terjadi masyarakat pro-Rusia menolak pemerintahan karena menurunkan militernya yang mengancam masyarakat disana, serta dengan masyarakat Timur Ukraina memiliki kesetiaan kepada Viktor

³The Guardian, *Ukraine crisis: Why Russia sees Crimea as its naval stronghold*, <http://www.theguardian.com/world/2014/mar/07/ukraine-russia-crimea-naval-base-tatars-explainer>, di akses 27 April 2016, pukul 11.47 WIB.

⁴The Guardian, *Russia sets terms for Ukraine deal as 40,000 troops mass on border*, <http://www.theguardian.com/world/2014/mar/31/russia-ukraine-deal-troops-lavrov-kerry>, di akses 27 April 2016, pukul 13.29 WIB.

Yanukovych yang pro-Rusia.

Setelah Crimea, konflik pun muncul ketika adanya ketegangan di wilayah perbatasan Ukraina yaitu Luhansk dan Donetsk. Konflik Timur Ukraina terlihat sebagai perang antara militer Ukraina, di satu sisi, dengan kelompok separatis di dukung Rusia. Pada konflik Ukraina tidak hanya pasukan resmi Ukraina dan kelompok separatis yang sedang berperang, akan tetapi ada kelompok relawan yang berbagi tujuan dengan Ukraina untuk menghancurkan separatis. Kelompok relawan ini belum tentu di perintah langsung oleh pemerintah, munculnya gerakan nasionalis relawan sayap kanan seperti Batalyon Aidar. Batalyon Aidar ini beraliansi dengan Kementerian Pertahanan Ukraina. Kelompok tersebut telah terbukti berguna untuk upaya perang pemerintah Ukraina dalam melawan separatis, tetapi mereka menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas jangka panjang dari Ukraina.⁵ Relawan ini merupakan pendukung pemerintah pusat Ukraina, tetapi mereka tidak berada di bawah kendali penuh pemerintah.. Batalyon Aidar tetap melakukan kejahatan perang tanpa kontrol komandan yang bertanggung jawab.⁶

Kewajiban yang pertama menjadikan kewenangan pertanggungjawaban atasan mengenai pelanggaran Hukum

Humaniter Internasional yang dilakukan selama perang berlangsung dapat di temukan dalam artikel 3 Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat : *A belligerent party which violates the provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.*⁷ Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan seorang atasan yang berwenang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum humaniter yang terjadi selama peperangan.

Menurut Konvensi Den Haag 1907, telah ditetapkan sebelum Perang Dunia I bahwa anggota angkatan perang harus diletakan di bawah otoritas komandannya yang bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka.⁸ Prinsip tanggung jawab komando terlihat pertama kali pada instrumen internasional seperti yang diadopsi pada 8 Juni 1977 sebagai Protokol Tambahan I atas Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan I mengatur tentang konflik bersenjata internasional. Pada judul "tugas-tugas komandan", artikel 87 menjelaskan dengan rinci tugas komandan adalah juga mencegah, menekan, dan menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan.⁹ Lebih jauh

⁵ Vox, *Pro – Kiev militias are fighting Putin , but has Ukraine created a monster it can't control*, <http://www.vox.com/2015/2/20/8072643/ukraine-volunteer-battalion-danger> , di akses 27 April 2016, pukul 13.45 WIB.

⁶ Amnesty International. *Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north Luhansk region.*

⁷ Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land on 18 October 1907.

⁸ KGPH. Haryomataram., *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*. (Jakarta: terAs, 2012). Halaman 161

⁹ *Ibid*, halaman 162, 164 dan 165

dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh setiap komandan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya untuk menjamin atau memastikan bahwa seluruh anggota bersenjata di bawah komandonya mengerti akan kewajibannya yang di atur dalam konvensi dan protokol tersebut. Setiap komandan yang mengetahui anak buahnya yang berada di bawah pengendaliannya yang sedang terlibat pelanggaran supaya melakukan tindakan – tindakan disiplin atau proses pidana.

Pertanggungjawaban

Komando tentunya didasari dari peraturan – peraturan yang terkait seperti peraturan yang menjelaskan tentang “tanggung jawab individu” secara umum yaitu *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* dan *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Serta Statuta Roma yang menjelaskan tentang “alasan menjalankan perintah atasan” dan “perintah atasan dan resep hukum”.¹⁰ Konteks pertanggungjawaban komando yaitu komandan atau atasan, tidak selalu salah melakukan tugasnya, tetapi tanggung jawab tersebut yang menjadikan komandan atau atasan tersebut bisa di persalahkan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban komando dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional?

2. Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran pertanggungjawaban komando dalam kejahatan perang oleh batalyon aidar di Ukraina?

Tujuan utama dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan pertanggungjawaban komando dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban komando dalam kejahatan perang oleh batalyon aidar.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode yang bersifat *doctrinal/normatif*, yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.¹¹ Metode penulisan hukum ini di pilih oleh penulis dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh penulis. Metode ini digunakan untuk meneliti instrument – instrument Hukum Humaniter Internasional

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah telaah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang di lakukan untuk memberi

¹⁰ *Ibid*, halaman 172 - 173

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), halaman 11

gambaran penyajian dari isi kutipan - kutipan data yang diperoleh.¹² Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pengaturan pertanggungjawaban komando di dalam instrumen – instrumen Hukum Humaniter Internasional dan penerapan pertanggungjawaban komando terhadap pelaku kejahatan perang.

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku atau literatur terkait, peraturan-peraturan atau konvensi, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh jawaban dalam rumusan masalah. Dalam menganalisis bahan, penulis mempergunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada pihak lain.¹³

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan

Pertanggungjawaban

Komando dalam instrumen Hukum Humaniter

Internasional

A.1. Pengaturan

Pertanggungjawaban

Komando sebelum Perang Dunia I

A.1.1. Konvensi Den Haag IV 1907

Konvensi perdamaian yang kedua diadakan pada tahun 1907. Sebelumnya konvensi perdamaian yang pertama di adakan pada tahun 1899. Ketentuan di dalam Konvensi Den Haag sangat penting bagi komandan militer baik yang bertugas di darat, di laut maupun di udara. Konvensi Den Haag menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang bersengketa tentang cara melakukan operasi militer serta membatasi cara-cara yang dapat menyebabkan kerusakan pada pihak musuh.

Konvensi Den Haag IV 1907 mengatur mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat/ *The Laws and Customs of War on Land* merupakan salah satu instrumen HHI yang mengatur secara khusus pertanggungjawaban komando, dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907 dan Pengaturan pertanggungjawaban komando juga terdapat dalam Pasal 43 Konvensi Den Haag 1907

Negara Ukraina telah meratifikasi aturan di dalam Konvensi Den Haag IV 1907. Implementasi dari meratifikasi konvensi tersebut negara Ukraina mengadopsi peraturan di dalam konvensi ke beberapa peraturan Nasional yaitu Undang - Undang

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015). halaman 11

¹³Lexy J. Moleong, *Op.cit*, halaman 248

tentang Angkatan Bersenjata Ukraina 1991 / *Law on Armed Forces of Ukraine 1991*, Undang – Undang tentang Pertahanan Ukraina 1991 / *Law of Defence of Ukraine 1991*, Undang – Undang tentang Statuta dalam Angkatan Bersenjata Ukraina 1999 / *Law on the Statute of Internal Service of the Armed Forces of Ukraine 1999*, Undang – Undang tentang Statuta Kedisiplinan Angkatan Bersenjata Ukraina 1999 / *Law of Ukraine on the Disciplinary Statute of the Armed Forces of Ukraine 1999*, dan Kode Pertahanan Sipil 2012 / *Code of Civil Defence 2012*. Fungsi meratifikasi Konvensi tersebut yaitu untuk mengadopsi sejumlah aturan dan adat istiadat yang berkaitan dengan tata cara perang di darat.¹⁴

A.2 Pengaturan Pertanggungjawaban Komando setelah Perang Dunia ke - I

A.2.1 Konvensi Jenewa 1929

Konvensi Jenewa 1929 merupakan versi ketiga dari Konvensi Jenewa setelah tahun 1864 dan 1906. Konvensi tahun 1929 digantikan oleh Konvensi Jenewa (I) 1949.

Konvensi Jenewa 1929 mengatur mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat/*The Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field* di dalam ketentuan peraturannya, telah di singgung secara khusus adanya pengaturan pertanggung jawaban

komando di dalam Pasal 26 Konvensi Jenewa 1929

Konvensi ini menjadi acuan awal bagi Konvensi Jenewa selanjutnya yang kedepannya dapat membuat regulasi – regulasi yang relevan di masa yang akan datang. Jadi setiap komandan wajib mematuhi aturan Konvensi yang berlaku pada masanya dan dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai pemimpin pasukan.

Negara Ukraina tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1929. Fungsi konvensi ini yaitu untuk melindungi para tentara, tenaga medis dan pemuka agama yang tidak berada di medan pertempuran.

A.3 Pengaturan Pertanggungjawaban Komando setelah Perang Dunia ke - II

A.3.1 Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg 1945

Piagam Mahkamah Militer Internasional 1945 suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang yang dilakukan para anggota-anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer dan ekonomi dari Nazi Jerman.

Rangkaian persidangan ini dilakukan dari tahun 1945 sampai 1946 di gedung Pengadilan Nuremberg (*Nuremberg Palace of Justice*) di kota Nuremberg, Jerman. Pengaturan pertanggungjawaban komando secara khusus dapat diketahui di dalam Pasal 8 Piagam Mahkamah Militer Internasional 1945/ *Charter of the International Military*

Negara Ukraina tidak dapat

¹⁴ Global Rights Compliance LLP, *The Domestic Implementation of International Humanitarian Law in Ukraine*, Kyiv, Ukraine. May 2016, halaman 233

meratifikasi Piagam Mahkamah Militer Internasional 1945 karena ketentuan tersebut sudah tidak berlaku. Ketentuan dari Piagam tersebut hanya dapat di adopsi nilai – nilai nya saja yang dapat di jadikan dasar suatu peraturan negara untuk mengadili penjahat perang yang memberikan perintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan orang yang melaksanakan perintah tersebut karena keduanya telah melakukan kejahatan.

A.3.2 Piagam Mahkamah Militer Internasional Tokyo 1946

Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh 1946/ *Charter of the Military Tribunal for the Far East* adalah pengadilan internasional yang mulai diselenggarakan pada 3 Mei 1946 dengan tujuan untuk mengadili para pemimpin kekaisaran Jepang atas tiga kategori kejahatan yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama Perang Dunia II. Pengadilan tersebut dilaksanakan di kota Tokyo, Jepang.

Pengaturan secara khusus tentang pertanggungjawaban komando tertuang di Pasal 6 Piagam tersebut mengatur tentang “*Responsibility of Accused*”

Negara Ukraina tidak dapat meratifikasi Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh 1946 karena ketentuan tersebut sudah tidak berlaku. Ketentuan dari Piagam tersebut hanya dapat di adopsi nilai – nilai nya saja yang dapat di jadikan dasar suatu peraturan negara untuk mengadili penjahat perang yang melaksanakan perintah komandan untuk melakukan

kejahatan perang.

A.3.3 Konvensi Jenewa I & II 1949

Konvensi Jenewa I 1949 mengatur mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat/ *the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*. Konvensi ini memberikan perlindungan bagi yang terluka dan sakit, tetapi juga untuk tenaga medis dan keagamaan, unit medis, bangunan dan transportasi medis serta konvensi ini juga mengakui lambang khas yang harus dilindungi.

Konvensi Jenewa II 1949 mengatur mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut/ *the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*. Konvensi ini diberlakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang terluka, sakit, dan tentara yang menjadi korban karamnya kapal yang ditemukan di laut. Tindakan ini dilakukan karena meningkatnya jumlah armada kapal perang yang dibentuk dan jumlah perang yang terjadi di laut.

Pertanggungjawaban komando secara khusus telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Pasal 1 *Common Articles* pada keempat Konvensi Jenewa 1949. Kewajiban untuk menjamin penghormatan atas konvensi tersebut, mencakup perintah - perintah yang dikeluarkan oleh negara kepada aparaturnya termasuk komandan-komandan militer, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam konvensi

pada khususnya dan ketentuan HHI pada umumnya.

Terkait dengan persoalan pertanggungjawaban komando secara khusus di atur dalam ketentuan Pasal 45 Konvensi Jenewa I mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat tahun 1949

Selanjutnya, hal yang sama diatur dalam ketentuan Konvensi Jenewa II mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut tahun 1949 Pasal 46.

Negara Ukraina telah meratifikasi kedua konvensi tersebut. Implementasi dari meratifikasi konvensi tersebut negara Ukraina mengadopsi peraturan di dalam konvensi ke beberapa peraturan Nasional yaitu Undang – Undang tentang Pertahanan Ukraina 1991 / *Law of Defence 1991*, *Criminal Code of Ukraine 2001* / Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Ukraina 2001 dan Kode Pertahanan Sipil Ukraina 2012 / *Code of Civil Defence 2012*. Fungsi meratifikasi kedua konvensi tersebut yaitu mengadopsi aturan yang berada di dalam kedua konvensi ini untuk melindungi tentara, tenaga medis dan pemuka agama yang *hors de combat*¹⁵ di darat dan di laut.¹⁶

A.3.4 Protokol Tambahan I 1977

Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur mengenai Perlindungan Korban Konflik

Bersenjata Internasional/*The Protection of Victims of International Armed Conflict*. Protokol tersebut terbentuk karena metode perang dan tata cara berperang (Conduct of War) yang digunakan oleh berbagai negara telah berkembang. Protokol ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas, tetapi dilarang menggunakan senjata serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak diinginkan. Protokol ini adalah pelengkap dari Konvensi Jenewa 1949.

Pengaturan mengenai substansi pertanggungjawaban komando telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87. Pasal 86 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan dalam Pasal 87 Protokol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur mengenai kewajiban komandan.

Negara Ukraina telah meratifikasi Protokol tersebut. Implementasi dari meratifikasi konvensi tersebut negara Ukraina mengadopsi peraturan di dalam konvensi ke beberapa peraturan Nasional yaitu Undang - Undang tentang Angkatan Bersenjata Ukraina 1991 / *Law on Armed Forces of Ukraine 1991*, Undang – Undang tentang Pertahanan Ukraina 1991 / *Law of Defence of Ukraine 1991*, Undang – Undang tentang Statuta dalam Angkatan Bersenjata Ukraina 1999 / *Law on the Statute of Internal Service of the Armed Forces of Ukraine 1999*, Undang – Undang tentang Statuta Kedisiplinan Angkatan Bersenjata Ukraina 1999 /

¹⁵ "out of combat" adalah kombatan yang tidak mampu (tidak berdaya) untuk melakukan serangan kepada pihak musuh, baik karena sakit, luka-luka atau memang telah menyerah.

¹⁶ Global Rights Compliance LLP, *Op.cit*, halaman 236

Law of Ukraine on the Disciplinary Statute of the Armed Forces of Ukraine 1999, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Ukraina 2001 / *Criminal Code of Ukraine 2001*. Fungsi meratifikasi Protokol ini yaitu untuk melindungi para korban konflik bersenjata internasional seperti tentara yang sakit dan terluka, tawanan perang dan warga sipil.¹⁷

A.4 Pengaturan Pertanggungjawabn Komando setelah Perang Dingin

A.4.1 Statuta ICTY 1993

Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Negara Yugoslavia 1993 (*Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / ICTY*) memiliki fungsi sebagai pengadilan PBB yang berurusan dengan kejahatan perang yang terjadi selama konflik di negara bekas Yugoslavia pada tahun 1990. Pengadilan ini kemudian mengambil tempat di Kroasia dan Bosnia-Herzegovina.

Badan ini memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah bekas negara Yugoslavia semenjak 1991 yaitu pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran undang - undang perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuan utama dari ICTY adalah untuk mengadili pelaku yang paling bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, perusakan harta benda dan kejahatan lainnya yang tercantum dalam Tribunal Statuta.

Statuta ini secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban komando baik bersifat aktif maupun pasif (*crimes by omission*).¹⁸ Statuta tersebut mengatur tentang “*Individual Responsibility*” dalam Pasal 7 ayat (1-4).

Negara Ukraina tidak meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia 1993. Fungsi Statuta ini yaitu mengadili pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengikuti perintah atasan dan memerintahkan untuk melakukan kejahatan perang.

A.4.2 Statuta ICTR 1994

Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda 1994 (*Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda / ICTR*) mempunyai Yurisdiksi adalah genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tujuan di dirikannya pengadilan ini adalah untuk mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida di Rwanda dan pelanggaran hukum internasional di Rwanda tahun 1994.

Statuta ini secara khusus mengatur tentang “*Individual Criminal Responsibility*” dalam Pasal 6 Statuta ICTR.

Negara Ukraina tidak meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Intenasional untuk Rwanda 1994. Fungsi Statuta ini yaitu mengadili pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan terhadap

¹⁷ *Ibid*, halaman 237

¹⁸ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. (Jakarta. Rajawali Press 2013), halaman 143

kemanusiaan dengan mengikuti perintah atasan dan memerintahkan untuk melakukan kejahatan perang dengan kesadaran dari pelaku atas partisipasinya dalam melakukan kejahatan.

A.4.3 Kode Etik Komisi Keamanan dan Kerjasama antar negara di Eropa 1994

Kode Etik Komisi Keamanan dan Kerjasama antar negara di Eropa 1994/ The Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) Code of Conduct juga dikenal sebagai Komisi Helsinki AS adalah lembaga pemerintah AS independen yang diciptakan oleh Kongres pada tahun 1975 untuk memantau dan mendorong kepatuhan negara – negara yang berpartisipasi terhadap Final Act Helsinki. Komisi ini di dirikan pada tahun 1975 berdasarkan UU Umum No 94-304. Komisi ini berganti nama pada tahun 1995 menjadi Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama antar negara di Eropa Organization for Security and Cooperation in Europe) (OSCE) merupakan organisasi keamanan antar negara terbesar di dunia. Tujuannya meliputi masalah seperti pengontrolan senjata, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang adil. OSCE adalah sebuah organisasi ad hoc dibawah Piagam PBB (Bab VIII) ditujukan pada peringatan awal, pencegahan konflik, manajemen krisis dan rehabilitasi setelah konflik.

Komisi ini telah mengatur juga secara khusus tentang pertanggungjawaban komando yang tertera di dalam paragraf 31 Kode Etik tersebut

Negara Ukraina telah menandatangani Kode Etik Komisi

Keamanan dan Kerjasama antar negara di Eropa 1994. Fungsi dari menyetujui Kode Etik ini yaitu untuk memerintahkan kepada Angkatan Bersenjata untuk melaksanakan perintah atasan dalam kondisi apapun dengan mematuhi aturan nasional dan internasional.

A.4.4 Rancangan Kode Etik Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia 1996

Rancangan Kode Etik Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia 1996/*International Law Commission (ILC) Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind* rancangan tersebut diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional di sidang ke empat puluh kedelapan di Jenewa tahun 1996 dengan mengadopsi serangkaian norma - norma atau prinsip - prinsip hukum internasional yang terangkum di dalam rancangan tersebut. Norma dan prinsip hukum yang di adopsi yaitu kejahatan agresi, pertanggungjawaban komando (*command responsibility*), kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap PBB dan personel - personelnnya, serta kejahatan perang.

Rancangan tersebut secara khusus telah mengatur tentang “*individual responsibility*” khususnya pada Pasal 2 ayat (3) huruf b,

Negara Ukraina tidak meratifikasi Rancangan Kode Etik Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia 1996. Fungsi Rancangan ini yaitu memerintahkan kepada setiap individu untuk bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan yang di lakukan dengan

inisiatif sendiri ataupun dengan perintah atasan. Tanggung jawab yang memerintah untuk melakukan kejahatan lebih bersalah dalam beberapa hal di karenakan bawahan melakukan kejahatan bukan dengan inisiatifnya sendiri.

A.4.5 Statuta Roma 1998

Statuta Roma 1998/*International Criminal Court* (ICC) adalah sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (*impunity*). Yurisdiksi Statuta ini hanya terbatas terhadap kejahatan serius yang memprihatinkan masyarakat internasional secara keseluruhan berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.

Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban komando, secara khusus di atur dalam Pasal 28 Statuta ini yang menjadi dasar bagi pendirian ICC

Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pendirian ICC menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas kejahatan perang bukan hanya sebatas individual (*individual criminal responsibility*) tetapi juga meliputi pula didalamnya pertanggungjawaban komando (*command responsibility*).

Negara Ukraina hanya menandatangani ketentuan Statuta Roma 1998 dan tidak meratifikasi Statuta tersebut. Fungsi menyetujui Statuta tersebut yaitu untuk mengatur tentang fungsi pengadilan, yurisdiksi dan struktur. Statuta tersebut mempunyai ketentuan khusus empat

kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.¹⁹

A.4.6 Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone 2002

Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone 2002/*Statute of the Special Court for Sierra Leone* adalah badan yudisial yang didirikan oleh pemerintah Sierra Leone dan PBB untuk mengusut orang - orang yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran - pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di Sierra Leone setelah tanggal 30 November 1996 dan selama Perang Saudara Sierra Leone.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban komando, pada Statuta ini secara khusus telah mengatur tentang "*Individual Criminal Responsibility*" terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Statuta tersebut, Pasal 6 ayat (2) dan (4)

Negara Ukraina tidak meratifikasi Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone 2002 karena ketentuan tersebut hanya berlaku di Sierra Leone. Ketentuan dari Statuta tersebut hanya dapat di adopsi nilai - nilai nya saja untuk di jadikan dasar suatu peraturan negara untuk mengadili pelaku ataupun pejabat pemerintah yang telah melakukan kesalahan tidak akan di ringankan hukumannya atas pertanggungjawaban pidananya dan juga berlaku terhadap atasan yang mengetahui kesalahan bawahannya.

A.4.7 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006

¹⁹ Global Rights Compliance LLP, *Op.cit*,halaman 245

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006 /The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance adalah instrumen internasional hak asasi manusia dari PBB untuk mencegah penghilangan paksa yang di definisikan di dalam hukum internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengaturan pertanggungjawaban komando secara khusus diatur juga di dalam Konvensi ini pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2)

Negara Ukraina telah meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006. Implementasi dari meratifikasi konvensi tersebut negara Ukraina mengadopsi peraturan konvensi ini untuk membuat peraturan Nasional yaitu *Ukraine - Law on Accession to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2015*. Fungsi meratifikasi Konvensi ini yaitu untuk mewajibkan negara menyelidiki tindakan penghilangan paksa dan membawa pelaku penghilangan paksa untuk bertanggung jawab di pengadilan.²⁰

A.4.8 Statuta Khusus Lebanon 2007

Statuta Khusus Lebanon 2007 / Statute of the Special Tribunal for Lebanon atau di sebut dengan

Tribunal Hariri adalah pengadilan pidana internasional yang beroperasi di bawah hukum pidana Lebanon untuk melaksanakan investigasi dan penuntutan mereka yang bertanggung jawab untuk pembunuhan Rafic Hariri mantan perdana menteri Lebanon, dan kematian 22 orang lainnya.

Pengaturan pertanggungjawaban komando secara khusus terdapat di dalam Pasal 3 Statuta tersebut \

Negara Ukraina tidak meratifikasi Statuta Khusus Lebanon 2007. Fungsi dari meratifikasi Statuta tersebut untuk mengatur setiap individu berkewajiban bertanggung jawab atas tindakan pidana yang di lakukan sendiri dan bertanggung jawab atas perintahnya kepada bawahannya.

Berdasarkan instrumen - instrumen hukum di atas, ketentuan – ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada para pemegang komando agar bertanggung jawab untuk mencegah anak buahnya dari tindakan pelanggaran hukum serta bertanggung jawab untuk menghukum anak buahnya jika ketentuan hukum tersebut dilanggar dengan sengaja.

Hubungan atasan dan bawahan dalam hal ini komando dibagi dalam dua jenis, yaitu *de jure*²¹ dan *de facto*²². Komando secara *de jure* mengutamakan kepada struktur formal pemegang kekuasaan dalam suatu lembaga negara, sehingga berwenang mengeluarkan suatu kebijakan. Sedangkan komando secara *de facto*

²⁰ Global Rights Compliance LLP, *Op.cit.*, halaman 244

²¹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, (West Group 2004) halaman 1288

²² *Ibid*, halaman 1258

mengutamakan pada kemampuan kontrol secara efektif pemegang komando terhadap anak buahnya, keharusan mengetahui segala tindakan anak buah, kewajibannya mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan hukuman bagi anak buah yang melanggar peraturan.

Negara Ukraina berdasarkan ketentuan di atas telah meratifikasi ketentuan yang berada di dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa I & II 1949, Protokol Tambahan I 1977 dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006. Ketentuan yang di tandatangani oleh Negara Ukraina yaitu di dalam Kode Etik Komisi Keamanan dan Kerjasama antar negara di Eropa 1994 dan Statuta Roma 1998.

Dasar dari ketentuan Statuta ICTY 1993, Statuta ICTR 1994, dan Rancangan Kode Etik Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia 1996 telah membentuk Statuta Roma 1998 untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum sesuai dengan norma – norma dan nilai – nilai yang terkandung di dalam ketentuan dasar pembentuk Statuta tersebut.

Kode Etik Komisi Keamanan dan Kerjasama antar negara di Eropa 1994 menjadi aturan pelengkap untuk mengawasi dan mengatur ketentuan setiap negara dengan melakukan peringatan awal, pencegahan konflik, manajemen krisis dan rehabilitasi setelah konflik.

Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone 2002 dan Statuta Khusus Lebanon 2007 mengadili penjahat perang sesuai dengan

peraturan berdasarkan hukum pidana di bawah negara masing – masing. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006 telah melengkapi peraturan dari instrumen hukum humaniter internasional sebelumnya untuk mencegah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan khususnya penghilangan paksa.

B. Pertanggungjawaban Komando dalam Kejahatan Perang oleh Batalyon Aidar di Ukraina

B.1 Latar Belakang Kasus Kejahatan Perang oleh Batalyon Aidar

Batalyon Aidar adalah salah satu batalyon yang paling terkenal skandalnya baik di Ukraina dan di luar negeri terutama karena tuduhan melakukan kejahatan perang di wilayah Luhansk Oblast ketika mengambil bagian dalam *The Anti-Terrorist Operation (ATO)*.²³ Para pejuang batalyon tersebut banyak yang mengaku radikal sayap kanan, berpandangan neo-Nazi dan menggunakan simbol-simbol Nazi.²⁴ Batalyon Aidar dibentuk oleh komisariat militer dari Luhansk Oblast dan termasuk penduduk wilayah Ukraina, baik dari bagian Barat, Timur dan Tengah.²⁵ Batalyon ini dipelopori oleh Serhiy Melnychuk, seorang pemimpin Maidan *Self-Defense*. Mantan Kepala Administrasi Negara wilayah

²³ Amnesty International. *Loc.cit*

²⁴ E. Savchuk, *The Guardian: The women fighting on the frontline in Ukraine*. <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/05/ukraine-women-fighting-frontline>, di akses 31 Juli 2016, pukul 13.18 WIB

²⁵ A. Manchuk, *Battalion of death*, <http://liva.com.ua/batalonyi-smerti.html>, di akses 31 Juli 2016, pukul 13.30

Dnipropetrovsk Oblast yang juga berprofesi sebagai pengusaha yaitu Inhor Kolomoisky (melalui Yayasan Pertahanan Negara-Nya)²⁶ dan Kepala Maidan *Self-Defense* yaitu komandan Andriy Parubiy²⁷ yang membantu untuk mengatur dan merekrut anggota-anggota Batalyon Aidar pada awal Mei 2014.

Aktivis yang disebut *Afghan Hundred* adalah salah satu bagian dari Maidan *Self-Defense* serta ratusan aktivis "*Medvedi*"²⁸ yang terdiri dari anggota-anggota dan pendukung sejumlah organisasi-organisasi ekstremis radikal yang mengambil bagian dalam tindakan kekerasan di tengah kota Kiev telah menjadi tulang punggung Batalyon Aidar ketika sedang terbentuk.

Batalyon Aidar terdiri dari anggota organisasi nasionalis radikal, yaitu UNA-UNSO²⁹, *Ukraine Patriot*³⁰, "*Right Sector*"³¹ dan

*Svoboda All Ukrainian Union*³². Menurut laporan Amnesty International, para pejuang dari Batalyon Aidar terlibat dalam penculikan, penahanan, penganiayaan, pencurian, pemerasan dengan jumlah uang yang besar dan eksekusi terhadap tahanan.

Menurut Jaksa Agung Ukraina, penyelidikan praperadilan menemukan bahwa dalam bulan Mei - September 2014, mantan Komandan Batalyon Aidar Serhiy Melnychuk membuat kelompok bersenjata yaitu Batalyon Aidar dan orang yang tidak ikut dalam Batalyon untuk menyerang perusahaan, lembaga - lembaga, organisasi dan individu serta melakukan kejahatan lainnya secara bebas untuk menguasai harta milik orang lain, mengambil bagian dalam di dalam kelompok lain dan mengatur serangan yang akan dilakukannya.

Jaksa Agung Ukraina menuduh kelompok Melnychuk telah menyerang anggota dari Batalyon lain untuk menetapkan kontrol atas bantuan relawan yang diterima di Irpin dan Zhytomyr pada bulan November 2014 untuk menyerang

²⁶ A. Lysyuk, *The Russian companies we must subtract everything*. <http://obozrevatel.com/interview/81096-gennadij-korban-u-rossijskih-kompanij-myi-dolznyi-otnyat-vse.htm>, di akses 31 Juli 2016, pukul 13.43 WIB

²⁹ Ukrainian truth: *Aydar. From the life of the battalion of daring*.

<http://www.pravda.com.ua/articles/2014/07/21/7032532/>, di akses 31 Juli 2016, pukul 14.10 WIB

²⁸ *Ibid.* (Medvedi mean from Slovenian language is "Bear")

²⁹ 14 days in

"Aydar": *Son Pandraka rozpoviv podrobnici injured father*. <http://charivne.info/news/14-dniv-v-Aydari-sin-Pandraka-rozpoviv-podrobtsi-poranennya-batka>, di akses 31 Juli 2016, pukul 14.59 WIB

³⁰ Alexander Matiushenko, *Ria Novosti-Ukraine Battalion "Aydar" : Volunteers or bandits?*,

<http://rian.com.ua/inquiry/20150120/362282502.html>, di akses 31 Juli 2016, pukul 15.20 WIB

³¹ A. Nalyvaiko, *Gazeta.ua: Julia - Moscow radical many ethnic Russia. Come to war, because it is a war against Putin*. <http://gazeta.ua/articles/events-journal/ulka-korinna-moskvichka-etnichna-rosiyanka-priyihala-na-vijnu-bo-ce-vijna-proti-putina/579908>, di akses 31 Juli 2016, puku 15.33 WIB

³² Zaporizhia freedom: "*freedom*" expresses its condolences to the relatives and friends of the *Svoboda* party Vladimir Zûzâ, who died defending the country from the occupiers.

<http://www.zaporizhzhya.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/053048/>, di akses 31 Juli 2016, pukul 15.40 WIB

penegak hukum di Kiev dan mencegah mereka untuk mehanan mantan Direktur Ukrspyr, Mykhailo Labutina pada bulan Desember 2014 yang mengatur demonstrasi tidak sah di gedung Departemen Pertahanan pada Februari 2015 dan menculik pejuang Batalyon Aidar yaitu I. Radchenko di Februari 2015.³³ Dewan Tertinggi Ukraina didukung pengajuan Jaksa Agung dan menyetujui untuk membawa Serhiy Melnychuk ke pengadilan.³⁴ Pengadilan Negeri Pechersky Kiev memberikan penetapan khusus kepada mantan komandan tersebut dalam bentuk jaminan 365.000 *hryvnias*³⁵ serta melarang dia berpergian ke luar dari ibukota Kiev.³⁶

**B.2 Analisis
Pertanggungjawaban
Komando dalam Kejahatan
Perang oleh Batalyon Aidar**
*International Committee of
the Red Cross/ICRC* menyatakan bahwa *International Humanitarian Law* telah membebaskan kewajiban

³³ Ukrainska Pravda: GPU: Melnychuk organized gang of volunteers.
<http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/20/7068503/>, di akses 1 Agustus 2016, pukul 02.33 WIB

³⁴ Correspondent. NET: Rada withdrew immunity from Melnychuk.
<http://korrespondent.net/ukraine/3522781-rada-sniiala-neprykosnovennost-s-melnychuka>, di akses 1 Agustus 2016, pukul 02.49 WIB

³⁵ *Hryvnias* adalah mata uang negara Ukraina
³⁶ RIA Novosti-Ukraine: Court elected measure ex-combat "Aydar" in the form of cash collateral.
<http://rian.com.ua/society/20150611/368806541.html>, di akses 1 Agustus 2016, pukul 02.58 WIB

kepada Pemerintah Ukraina untuk meminta setiap komandan militer melakukan tugasnya untuk mencegah, menekan, dan mengambil tindakan terhadap bawahan mereka yang melakukan pelanggaran berat.

Kasus kejahatan perang yang terjadi di Ukraina oleh Batalyon Aidar menjadi perhatian khusus pemerintah Ukraina. Mantan Komandan Batalyon Aidar Serhiy Melnychuk telah membuat dan memerintahkan kelompok bersenjata yaitu Batalyon Aidar secara terorganisir untuk melakukan kejahatan perang. Serhiy Melnychuk telah melanggar ketentuan sebagai komandan untuk bertanggung jawab terhadap pasukan dan bawahannya. Pemerintah Ukraina mempunyai peraturan nasional secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban komando yang telah melakukan kejahatan perang.

Pertanggungjawaban komando di negara Ukraina mengatur tentang "superior responsibility" yang berada di dalam Pasal 425 dan 426 *Criminal Code of Ukraine 2001* (KUHP Ukraina) yang mengadopsi peraturan di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

**B.3 Penegakan Hukum atas
Pertanggungjawaban
Komando dalam Kejahatan
Perang oleh Batalyon Aidar**
Pemerintah Ukraina telah melakukan penegakan hukum dalam pertanggungjawaban komando terhadap pelaku yang didakwa telah melakukan kejahatan perang oleh Batalyon Aidar. Proses penegakan hukum dalam pertanggungjawaban komando telah dilakukan melalui

penyelidikan oleh Jaksa Agung Ukraina sampai mendapatkan pembuktian yang konkrit.

B.3.1 Mekanisme pendakwaan terhadap pelaku Kejahatan Perang oleh Batalyon Aidar

Pengadilan Negeri Pechersky Kiev memberikan keputusan untuk membatasi pergerakan Serhiy Melnychuk dengan melarang keluar dari ibukota Kiev dan memberikan jaminan 360.000 *hryvnias* sebagai ketentuan dari pengadilan pada 11 Juni 2015. Kemudian, pada 7 Agustus 2015 pengadilan memperpanjang penetapan terhadap Serhiy Melnychuk yang dilarang keluar dari ibukota Kiev dengan pembayaran deposit selama dua bulan sampai tanggal 7 Oktober 2015.³⁷

Proses pendakwaan terhadap Serhiy Melnychuk untuk dibawa ke persidangan mulai berlangsung pada 1 Oktober 2015. Berjalannya proses tersebut terjadi penundaan untuk menangkap terdakwa mantan komandan Batalyon Aidar tersebut di karenakan sakit pada 16 November 2015. Kemudian, yang di lakukan Jaksa Agung Ukraina yaitu menginvestigasi kembali dan menunda penangkapan Serhiy Melnychuk demi mendapatkan bukti yang jelas dan dapat di pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pechersky Kiev untuk menangkap paksa terdakwa tersebut, tetapi hingga saat ini belum kembali

dilakukan percobaan untuk penangkapan.

B.3.2 Dakwaan Jaksa Agung Ukraina terhadap pelaku Kejahatan Perang oleh Batalyon Aidar

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Batalyon Aidar telah menjadi masalah serius yang di hadapi pemerintah Ukraina. Masalah ini tidak hanya menjadi perhatian negara Ukraina saja, tetapi negara dan lembaga internasional juga telah menyoroti masalah kejahatan perang yang terjadi di Ukraina.

Amnesty Internasional pada 8 September 2014 telah mengklaim bahwa Batalyon Aidar melakukan kejahatan perang termasuk penculikan, penangkapan tidak sah, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan pembunuhan.³⁸ Tuduhan tersebut membuat pemerintah Ukraina melakukan upaya untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan perang tersebut.

Jaksa Agung Ukraina, Viktor Shokin pada 3 Juni 2015 telah di setujui untuk melakukan investigasinya terhadap mantan komandan Batalyon Aidar tersebut oleh Dewan Tertinggi Ukraina dengan menetapkan bahwa terdakwa telah membuat kelompok bersenjata yang terorganisir dengan tujuan untuk menyerang perusahaan, lembaga, organisasi dan individu serta melakukan kejahatan terhadap masyarakat setempat dengan merampas senjata api dan properti lainnya dari bulan Mei – September 2014 .

Berdasarkan temuan investigasi lain yang menetapkan bahwa Serhiy Melnychuk telah

³⁷ *The GPU handed over to the court indictment against Melnychuk and five other persons,*

<http://en.reporter-ua.ru/the-gpu-handed-over-to-the-court-indictment-against-melnichuk-and-five-other-persons.html>,

diakses 2 Agustus 2016, pukul 22.40 WIB

³⁸ Amnesty International, *Loc.cit*

menggunakan Batalyon Aidar dan merekrut pesonil di luar Batalyonnya. Jaksa Agung Ukraina telah mendakwa mantan komandan Batalyon Aidar tersebut dengan tindakan kejahatan peranginya sebagai berikut:

1. Menyerang anggota Batalyon lainnya untuk menetapkan kontrol atas bantuan relawan dari Irpen dan Zhitomir pada November 2014.
2. Menyerang para penegak hukum di Kiev untuk menghentikan mereka dari upaya yang akan mereka lakukan untuk menahan Direktur Ukrspirt, Mykhailo Labutina pada Desember 2014
3. Melakukan tindakan illegal di bawah Departemen Pertahanan Ukraina pada Februari 2015
4. Menculik satu personel dari Batalyon Aidar yaitu I. Radchenko

Jaksa Agung Ukraina tersebut telah mendapat informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ukraina bahwa pengajuan untuk penghapusan kekebalan hukum Serhiy Melnychuk sebagai anggota DPR diterima tetapi tidak mendukung pengajuan Jaksa Agung untuk menangkap dan menahan mantan komandan Batalyon Aidar tersebut karena pelaku di anggap menjadi pahlawan pembebasan Ukrain

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Pertanggungjawaban Komando dalam Kejahatan Perang oleh

Batalyon Aidar di Ukraina, maka penulis dapat menarik kesimpulan atas rumusan masalah dalam skripsi berikut:

1. Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1929, Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg 1945, Piagam Mahkamah Militer Internasional Tokyo 1946, Konvensi Jenewa I & II 1949, Protokol Tambahan I 1977, Statuta ICTY 1993, Statuta ICTR 1994, Kode Etik Komisi Keamanan dan Kerjasama antar negara di Eropa 1994, Rancangan Kode Etik Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia 1996, Statuta Roma 1998, Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone 2002, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006, dan Statuta Khusus Lebanon 2007 yang telah dibahas, peraturan tentang pertanggungjawaban komando saling melengkapi dan relevan. Sehingga kesimpulan yang didapat yaitu pertanggungjawaban komando terhadap para pemegang komando tersebut timbul karena mereka tidak melaksanakan pengendalian sebagaimana mestinya terhadap anak buah atau bawahannya, sehingga gagal mencegah, menindak atau melaporkan kejahatan yang dilakukan anak buah atau bawahannya sesuai mekanisme ketentuan hukum dan peraturan instrumen hukum humaniter internasional yang berlaku.
2. Mantan komandan Batalyon Aidar yaitu Serhiy Melnychuk di

tetapkan sebagai terdakwa oleh Jaksa Agung Ukraina berdasarkan penyelidikan secara menyeluruh karena terdakwa telah membuat kelompok bersenjata dengan memerintahkan bawahannya untuk melakukan kejahatan perang. Batalyon Aidar telah diduga melakukan kejahatan perang dengan menculik, membunuh, mencuri, menyerang penegak hukum, menyerang anggota Batalyon lainnya, mengambil alih perusahaan, serta melakukan kejahatan terhadap masyarakat setempat dengan merampas senjata api dan properti lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai Pertanggungjawaban Komando dalam Kejahatan Perang oleh Batalyon Aidar di Ukraina, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban komando harus dapat menjadi acuan hukum terhadap para pemegang komando yang relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini dan pengaturan yang memuat konteks pertanggungjawaban komando dapat di adopsi oleh semua negara. Dengan demikian, pengaturan tersebut berjalan selaras sesuai dengan instrumen Hukum Humaniter Internasional.
2. Pemerintah Ukraina harus serius menanggulangi masalah pertanggungjawaban komando dalam kejahatan perang yang telah terjadi serta dapat menjaga

stabilitas keamanan suatu negara terhadap gerakan sparatis yang melakukan kejahatan perang dan harus mengadili terdakwa yang telah melakukan kejahatan perang. Jaksa Agung Ukraina dapat menjerat terdakwa Serhiy Melnychuk dengan Pasal 425 dan 426 KUHP Ukraina dengan di landasi Ukraine The Military Manual sesuai dengan ketentuan peraturan pertanggungjawaban komando yang berlaku, jika terbukti melakukan pelanggaran peraturan pertanggungjawaban komando. Jaksa Agung Ukraina juga diharapkan dapat mendakwa pelaku – pelaku lain yang diduga telah melakukan pelanggaran atas pertanggungjawaban komando dalam kejahatan perang khususnya di Ukraina.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- KGPH. Haryomataram, 2012, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*. (Jakarta: terAs).
- Moleong, Lexy J., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Nalesti Dewi, Yustina Trihoni, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. (Jakarta. Rajawali Press.)
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres).
- ### **Karya Tulis Ilmiah**
- Amnesty International. *Abuses and war crimes by the Aidar*



*Volunteer Battalion in the north
Luhansk region*

Global Rights Compliance LLP,
2016, *The Domestic
Implementation of International
Humanitarian Law in Ukraine*,
(Kyiv, Ukraine. May)

Kamus/Ensiklopedi

Bryan A Garner , 2004, *Black's Law
Dictionary Eighth Edition*, (West
Group)

Instrumen Internasional

Hague Convention (IV) Respecting
the Laws and Customs of War
on Land and Its Annex:
Regulations Concerning the
Laws and Customs of War on
Land on 18 October 1907

Data Internet

- 14 days in
"Aydar": *Son Pandraka rozpoviv
podrobnici injured father.*
[http://charivne.info/news/14-
dniv-v-Aydari-sin-Pandraka-
rozpoviv-podrobitsi-poranennya-
batka](http://charivne.info/news/14-dniv-v-Aydari-sin-Pandraka-rozpoviv-podrobitsi-poranennya-batka), di akses 31 Juli 2016
- A. Lysyuk, *The Russian companies
we must subtract everything.*
[http://obozrevatel.com/interview/
81096-gennadij-korban-u-
rossijskih-kompanij-myi-
dolznyi-otnyat-vse.htm](http://obozrevatel.com/interview/81096-gennadij-korban-u-rossijskih-kompanij-myi-dolznyi-otnyat-vse.htm), di akses
31 Juli 2016
- A. Manchuk, *Battalion of death*,
[http://liva.com.ua/batalonyi-
smerti.html](http://liva.com.ua/batalonyi-smerti.html), di akses 31 Juli 2016
- A. Nalyvaiko, *Gazeta.ua: Julia -
Moscow radical many ethnic
Russia. Come to war, because it
is a war against Putin.*

[http://gazeta.ua/articles/events-
journal/ ulka-korinna-
moskvichka-etnichna-rosiyanka-
priyihala-na-vijnu-bo-ce-vijna-
proti-putina/579908](http://gazeta.ua/articles/events-journal/ulka-korinna-moskvichka-etnichna-rosiyanka-priyihala-na-vijnu-bo-ce-vijna-proti-putina/579908), di akses 31
Juli 2016

Alexander Matiushenko, Ria
Novosti-Ukraine Battalion
"Aydar" : *Volunteers or
bandits?*,

[http://rian.com.ua/inquiry/201501
20/362282502.html](http://rian.com.ua/inquiry/20150120/362282502.html), di akses 31
Juli 2016

Aljazeera, *Ukraine, Russia cut \$15B
gas deal*,
[http://america.aljazeera.com/artic
les/2013/12/17/russia-restores-
oilflowstoukraine.html](http://america.aljazeera.com/articles/2013/12/17/russia-restores-oilflowstoukraine.html) , di akses
27 April 2016

Correspondent. NET: *Rada withdrew
immunity from Melnychuk.*
[http://korrespondent.net/ukraine/
3522781-rada-sniala-
neprykosnovennost-s-
melnychuka](http://korrespondent.net/ukraine/3522781-rada-sniala-neprykosnovennost-s-melnychuka), di akses 1 Agustus
2016

E. Savchuk, *The Guardian: The
women fighting on the frontline
in Ukraine.*
[https://www.theguardian.com/wo
rld/2015/mar/05/ukraine-women-
fighting-frontline](https://www.theguardian.com/world/2015/mar/05/ukraine-women-fighting-frontline), di akses 31
Juli 2016

RIA Novosti-Ukraine: *Court
elected measure ex-
combat "Aydar" in the form
of cash collateral.*
[http://rian.com.ua/society/201506
11/368806541.html](http://rian.com.ua/society/20150611/368806541.html), di akses 1
Agustus 2016

*The GPU handed over to the court
indictment against Melnychuk
and five other
persons,*[http://en.reporter-
ua.ru/the-gpu-handed-over-to-
the-court-indictment-against-](http://en.reporter-ua.ru/the-gpu-handed-over-to-the-court-indictment-against-)



[melnichuk-and-five-other-persons.html](#), diakses 2 Agustus 2016

<http://www.zaporizhzhya.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/053048/>, di akses 31 Juli 2016

The Guardian, *Russia sets terms for Ukraine deal as 40,000 troops mass on border*, <http://www.theguardian.com/world/2014/mar/31/russia-ukraine-deal-troops-lavrov-kerry> , di akses 27 April 2016

The Moscow Times : "*Moscow Court Sanctions Arrest of Ukraine Tycoon Governor Kolomoisky*". 2 July 2014. <https://themoscowtimes.com/news/moscow-court-sanctions-arrest-of-ukraine-tycoon-governor-kolomoisky-36951>, di akses 2 Agustus 2016, pukul 21.12 WIB

Ukraine Census 2001, <http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/>, di akses 27 April 2016

Ukrainian truth: Aydar. *From the life of the battalion of daring*. <http://www.pravda.com.ua/articles/2014/07/21/7032532/>, di akses 31 Juli 2016

UkrainskaPravda: *GPU: Melnichuk organized gang of volunteers*. <http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/20/7068503/>, di akses 1 Agustus 2016

Vox, *Pro – Kiev militias are fighting Putin , but has Ukraine created a monster it can't control*, <http://www.vox.com/2015/2/20/8072643/ukraine-volunteer-battalion-danger> , di akses 27 April 2016

Zaporizhia freedom: "*freedom*" expresses its condolences to the relatives and friends of the Svoboda party Vladimir Zûzâ, who died defending the country from the occupiers.